

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



REZA JUNI SYAPUTRI

2022 – 22133076

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

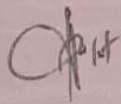
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Reza Juni Syaputri
NIM/ TM : 22133076 / 2022
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Sekolah Vokasi

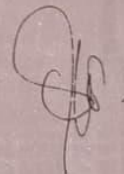
Padang, Agustus 2025

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Studi
Tugas Akhir Diploma Tiga (D3) Akuntansi



Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc
NIP.19840113 200912 2 005

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Dewi Pebriyani, S.E., M.Si
NIP. 19900205 201903 2 016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Juni Syaputri
NIM/TM : 22133076/2022
Tempat/ Tanggal Lahir : Koto Raya, 08 Juni 2003
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jln. Lakitan Selatan Karang Tengah, Kec Lengayang, Kab.Pesisir Selatan
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 1 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Reza Juni Syaputri

NIM. 22133076

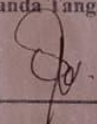
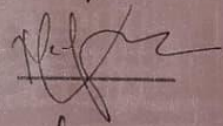
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Reza Juni Syaputri
NIM/ TM : 22133076 / 2022
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Sekolah Vokasi*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dewi Pebriyani, S.E., M.Si	(Ketua)	
Halkadari Fitra, SE, MM	(Anggota)	
Intan Nurbaiti Fawziah, S.E., M.Ak	(Anggota)	

ABSTRAK

**Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Dosen Pembimbing : Dewi Pebriyani, S.E., M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Akuntansi berbasis akrual telah menjadi standar pelaporan keuangan pemerintah sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mewajibkan pengakuan transaksi keuangan pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Meskipun secara formal sistem ini mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2015, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikannya sejak tahun 2013. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akrual di Bappeda telah berjalan secara umum, terutama dalam pengakuan beban dan penyusutan aset tetap. Namun demikian, masih terdapat kendala pada pencatatan aset tetap yang bersumber dari keterbatasan informasi mutasi dan penghapusan aset dari OPD lain. Selain itu, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal serta keterbatasan pelatihan teknis juga turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem ini. Dengan demikian, meskipun penerapan akuntansi akrual telah dilakukan, Bappeda masih memerlukan perbaikan pada aspek sistem informasi, prosedur pelaporan, serta peningkatan kompetensi SDM agar pelaksanaan akrual dapat berjalan secara menyeluruh dan konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kata kunci: *Akuntansi Akrual, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SAP, Evaluasi, Bappeda*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Bappeda Provinsi Sumatera Barat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi
2. Terutama kepada Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti selama proses pendidikan dan penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dr. Nelvitra, S.E, M.Si., Ak selaku Kepala Departemen Akuntansi
5. Ibu Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Dewi Pebriyani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah

membimbing dan memberikan arahan saat melaksanakan Tugas Akhir.

7. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat penulis yaitu Roza Heliani, Devina Shafira Maharani, Shiva Ihsana Qalbi, Widya Salsabila Agja, dan teman-teman yang lain yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan saran yang berguna bagi penulis.
9. Dan Teman-teman seperjuangan di Program Studi DIII Akuntansi angkatan 2022 atas kebersamaan, kerja sama, dan bantuan selama menjalani proses studi.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 27 Juli 2025

Reza Juni Syaputri

NIM. 22133076

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	7
2. Akuntansi Pemerintahan	8
3. Basis Akuntansi.....	9
4. Pengertian Basis Akrua.....	10
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
6. Karakteristik Kualitas Informasi Laporan Keuangan	16
7. Evaluasi Sistem Akuntansi.....	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	22
A. Bentuk Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
1. Lokasi Penelitian.....	23
2. Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23

2. Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Instansi.....	30
1. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat	30
2. Tugas Pokok dan Fungsi	33
3. Visi dan Misi	33
B. Hasil dan Pembahasan.....	35
1. Gambaran Umum Penerapan Sistem Akuntansi Akrua di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.....	35
2. Pembahasan Wawancara dengan Kasubag Keuangan	36
3. Analisis Neraca Terkait Aset Tetap	38
4. Evaluasi Penerapan SAP dan Akuntansi Akrua.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Aset Tetap Bruto Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020- 2024.....	39
Tabel 4.2 Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.....	31
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Neraca Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Lampiran 2 Laporan Neraca Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Lampiran 3 Laporan Neraca Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Lampiran 4 Laporan Neraca Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance dalam suatu pemerintahan tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Secara historis, sistem pencatatan keuangan pemerintah di Indonesia didominasi oleh basis kas, yaitu metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan pengeluaran pada saat kas diterima dan dikeluarkan. Metode kas mudah diterapkan, tetapi dalam menyajikan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, ada banyak hal yang tidak diperhitungkan, misalnya, piutang dan kewajiban, yang membuat metode kas tidak mencerminkan keadaan yang ada. Mardiasmo (2018) menyatakan kas tidak memadai dalam mengukur efisiensi dan efektivitas pengeluaran dan pendapatan.

Penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Regulasi ini secara spesifik menuntut penerapan akuntansi dengan basis akrual baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan penuh sistem akuntansi berbasis akrual ini dimulai secara efektif pada tahun anggaran 2015. Perbedaan yang paling mendasar antara basis akrual dengan basis kas adalah pada pengakuan transaksi basis akrual mengakui pendapatan dan beban pada saat peruntukannya, tanpa memperhatikan aliran kas di tangan. Akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan

Mahmudi (2015) menyatakan, berbasis akrual justru meningkatkan akuntabilitas publik serta kualitas pengambilan keputusan dimungkinkan berkat penyajian informasi yang lebih akurat dengan pengakuan kewajiban yang belum dibayar dan aset yang belum direalisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam perencanaan dan penganggaran. Bappeda bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kasubag Keuangan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2013, mendahului implementasi penuh secara nasional pada tahun 2015. Meskipun Bappeda telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi akrual, tantangan dalam pencatatan aset dan pengelolaan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penerapan basis akrual dalam konteks akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bersifat murni untuk seluruh jenis laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, yang merefleksikan pengakuan pendapatan dan belanja berdasarkan aliran kas. Sebaliknya, laporan keuangan lainnya seperti Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun secara penuh

menggunakan basis akrual. Penggunaan basis akrual pada laporan-laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih mendalam mengenai kinerja operasional, posisi keuangan, dan perubahan ekuitas, sehingga mendukung fungsi pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Meskipun ada kerangka regulasi, pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual di daerah masih memiliki tantangan. Dalam wawancara dengan Kasubag Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, beliau mengungkapkan bahwa berkalanya pencatatan beban secara akrual pada tepat pada saat kewajiban muncul, masalah utama masih pada pencatatan aset. Permasalahan ini muncul karena pencatatan aset seringkali memerlukan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya mengenai perubahan atau penghapusan aset antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang mengakibatkan informasi terbaru mengenai aset di Bappeda.

Selain itu, aspek kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah. Meskipun staf keuangan telah menerima pelatihan terkait implementasi akrual, pelatihan tersebut tidak bersifat rutin dan menyeluruh, sehingga tidak mampu membangun kompetensi secara berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Imelda et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan *accrual basis* secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Senada, penelitian oleh Sepputra (2019) menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia memegang peran penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Meskipun pelatihan telah dilakukan, rendahnya frekuensi dan kurangnya sistem informasi yang mendukung menjadikan pencatatan transaksi non-kas, termasuk aset tetap, belum optimal. Lebih lanjut, Pratama, Sinadela, dan Gushendarto (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Jambi juga menyimpulkan bahwa tantangan dalam penerapan akrual dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan sistem pengendalian internal, disertai pelatihan yang rutin dan terstruktur. Mengingat pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta berbagai tantangan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam pencatatan aset dan pengembangan kapasitas SDM maka evaluasi menyeluruh terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: “Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejak diberlakukannya sistem tersebut?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerapan akuntansi akrual, khususnya dalam proses penjurnalan transaksi keuangan?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejak implementasinya.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala teknis maupun non-teknis dalam proses penjurnalan.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman nyata dalam menganalisis praktik akuntansi sektor publik, meningkatkan kemampuan dalam menerapkan teori keuangan pemerintahan ke dalam konteks operasional di lapangan, serta menjadi bekal penting dalam dunia kerja dan pengembangan keilmuan di bidang akuntansi pemerintahan.

2. Bagi objek penelitian

Sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam proses penjurnalan, khususnya dalam pengakuan beban dan kewajiban yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait implementasi akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintah. Hasil kajian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pengembangan studi-studi sejenis maupun sebagai pembanding untuk instansi pemerintah daerah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum instansi tersebut telah mengimplementasikan sistem akrual sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan sistem ini telah dimulai sejak tahun 2013, bahkan sebelum kewajiban implementasi secara nasional berlaku penuh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan Bappeda dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi akuntansi sektor publik. Penerapan akrual secara praktis tercermin dalam proses pencatatan beban yang dilakukan saat timbulnya kewajiban, bukan lagi berdasarkan saat pencairan dana. Pengakuan beban seperti listrik, air, dan belanja barang dilakukan secara akrual dan dibuktikan pula dengan adanya penyusunan laporan keuangan seperti Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menggunakan basis akrual.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam penerapan akrual secara optimal, khususnya dalam pencatatan aset tetap. Nilai aset tetap pada neraca Bappeda menunjukkan stagnasi selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa proses mutasi, penghapusan, dan penambahan aset belum sepenuhnya tercatat secara akurat dan tepat waktu. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan

Bappeda pada informasi dari OPD lain terkait status dan keberadaan aset, sehingga pencatatan menjadi bersifat pasif. Selain itu, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal mengenai pelaporan berbasis akrual juga menjadi faktor penghambat kelancaran proses pelaporan. Walaupun staf keuangan telah memahami prinsip dasar akrual dan pernah mendapatkan pelatihan, kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kemampuan internal dalam mengelola pencatatan akrual, khususnya pada transaksi non-kas dan aset tetap.

Dengan demikian, meskipun secara umum penerapan akrual di Bappeda sudah berjalan dengan baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan secara lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar Bappeda Provinsi Sumatera Barat segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang khusus mengatur proses pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual. SOP tersebut diharapkan mampu menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan pelaporan yang lebih sistematis dan konsisten. Selain itu, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga perlu diperkuat, terutama dalam hal pelaporan mutasi, penghapusan, maupun penambahan aset tetap, agar informasi yang diterima Bappeda dapat lebih akurat dan terkini.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan teknis mengenai sistem akuntansi akrual perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh staf keuangan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, seperti SIPD, juga harus dioptimalkan untuk mempercepat proses pencatatan dan mencegah kesalahan data. Sebagai bentuk pengendalian internal, disarankan agar Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan akrual, baik melalui tim internal maupun dengan melibatkan pihak eksternal. Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan Bappeda dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi. Mahmudi, S. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Imelda, I., Hilmi, H., Mursidah, M., & Firdaus, R. (2024). *Pengaruh Penerapan Accrual Basis, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa. Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(2). <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/16133>
- Sepputra, R. (2019). *Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrual, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan di OPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang. <https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5212>
- Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2023). *Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrual, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di OPD Provinsi Jambi. Journal of Economics and Management*, 2(1). <https://ejournal.publine.or.id/index.php/eco/article/view/38>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Sinaga, J. S. G., Friya, Y. P. S., & Nugroho, H. (2020). *Evaluasi penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sibolga. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 7(2).
<https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3552> *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*
- Syarienda, Y., Fahlevi, H. B., & Hasan, B. (2018). *Problematika penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1).<https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10923>
- Erlina & Rasdianto, H. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2001). *Accounting Terminology Guide*. New York: AICPA.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2008). *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. Norwalk: FASB.
- Mu'am, A. (2011). *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yuliani, D. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darlis. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2015). *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01: Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan*. Jakarta: KSAP.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.